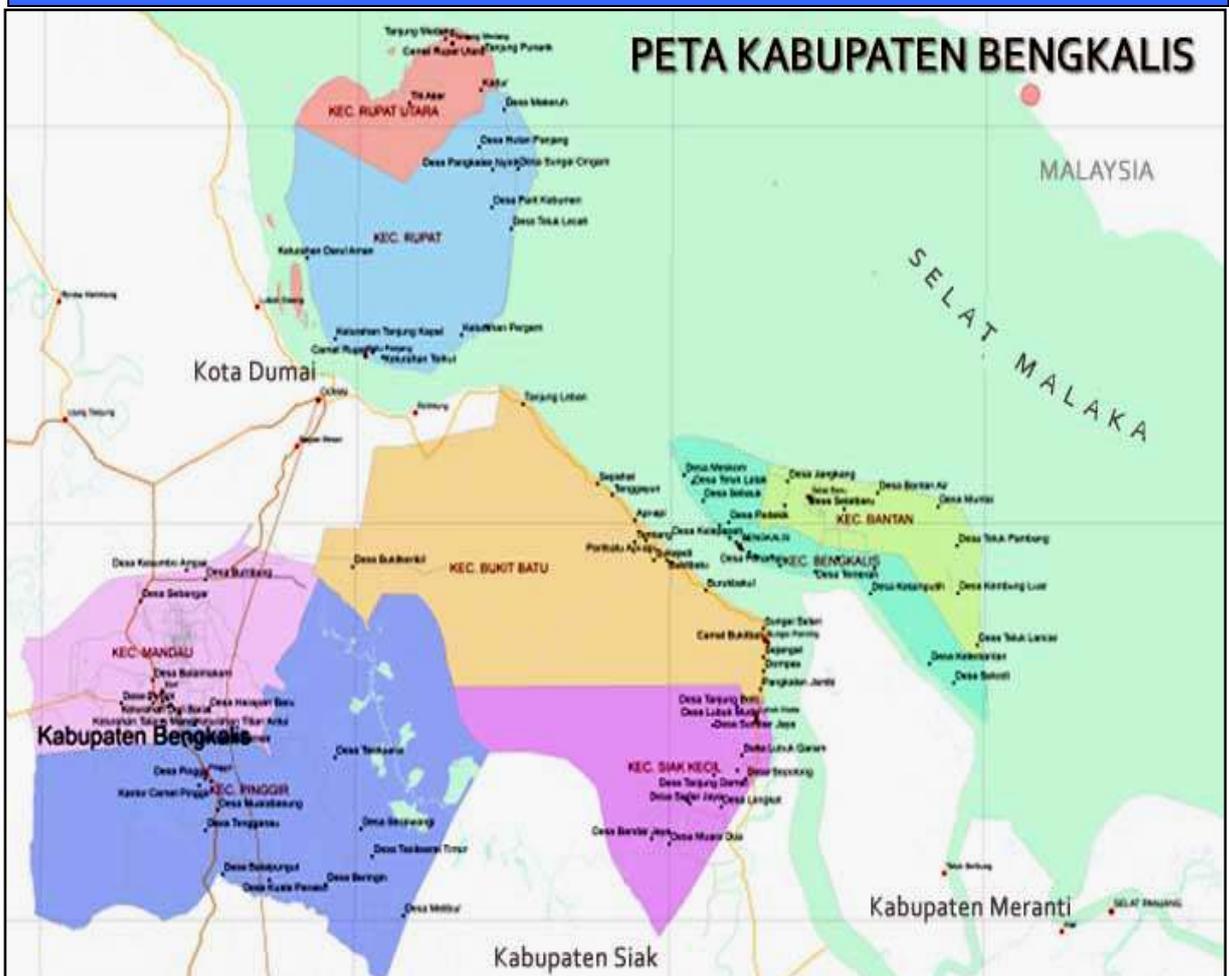


# PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2021



# DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 telah selesai disusun. Perubahan Renja PD tahun 2021 disusun dengan format dan sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708.

Perubahan Renja PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2021 disusun dengan memperhatikan evaluasi triwulan pelaksanaan renja yang sudah berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, menganalisis gambaran pelayanan PD dengan melakukan evaluasi internal Perangkat Daerah (PD) untuk menentukan isu-isu penting di dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja tahun 2021 ini didasarkan pada reuiu hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, dan evaluasi Renja PD didasarkan pada Renstra PD dan evaluasi Renstra PD setiap tahunnya didasarkan pada penelaahan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renja PD tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2021 disusun berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dengan semangat efektif dalam pelaksanaan dan efisien dalam pembiayaan untuk tercapainya tujuan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis tahun 2021.

Bengkalis, 28 Juni 2021



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mempedomani Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renja PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2021 disusun dengan memperhatikan evaluasi triwulan pelaksanaan renja yang sudah berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, menganalisis gambaran pelayanan PD dengan melakukan evaluasi internal Perangkat Daerah (PD) untuk menentukan isu-isu penting di dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja tahun 2021 ini yang didasarkan pada reviu hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, dan evaluasi Renja PD didasarkan pada Renstra PD dan evaluasi Renstra PD setiap tahunnya didasarkan pada penelaahan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)).

Sehubungan dengan pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) yang telah berlangsung selama satu tahun enam bulan ini sangat mempengaruhi hampir seluruh sisi aktifitas manusia dan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi proyeksi pendapatan nasional yang cenderung menurun. Pendapatan nasional yang cenderung menurun ini tentu sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah tahun 2021 dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan sangat bergantung pada pagu pembiayaan yang tersedia.

Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sampai dengan satu semester tahun 2021 telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan dokumen RKPD tahun 2021 untuk selanjutnya diproses menjadi Perubahan Renja PD tahun 2021. Kondisi ini diperoleh dari hasil perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan evaluasi kinerja dan realisasi fisik dan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 memuat perubahan pagu anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan serta perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil evaluasi renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Perubahan Renja PD Tahun 2021 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2021 dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berkembang dan berpengaruh pada prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan agar kinerja pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian tercapai secara efektif dalam pelaksanaan dan efisien dalam pembiayaan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang dijadikan dasar Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis;
27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021;
28. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021; dan

29. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/1212/2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021.

### **1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan**

#### **1.3.1. Maksud**

Adapun maksud penyusunan Perubahan Renja Tahun 2021 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2021 dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2021 adalah untuk merumuskan kembali sasaran, target dan capaian kinerja program dan kegiatan terhadap pergeseran dan perubahan anggaran tahun 2021.

#### **1.3.3. Dasar Pertimbangan Perubahan**

Dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021 telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan Perubahan Renja PD tahun 2021. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas sasaran, target dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2021. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. kebijakan Pemerintah Pusat terhadap perkembangan kerangka ekonomi daerah yang kurang sesuai dengan rencana penganggaran program dan kegiatan di dalam RKPD yang pada tahapan selanjutnya berpengaruh terhadap penganggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dibutuhkan sehingga berdampak terhadap penurunan pagu anggaran yang dialokasikan yang mengakibatkan terjadinya eliminasi dan rasionalisasi beberapa sub kegiatan dan pengurangan target kinerja beberapa sub kegiatan;
2. adanya evaluasi kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkruen (UPK), Sub Urusan UPK, NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) terhadap pelayanan dan fungsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis; dan
3. menjaga konsistensi sasaran, target dan capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas untuk menjamin terlaksananya UPK

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dalam rangka mendukung RPJMD serta Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

###### **1.1. Latar Belakang**

###### **1.2. Landasan Hukum**

###### **1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan**

###### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

###### **2.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2021**

###### **2.2. Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja dengan APBD**

##### **BAB III. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

###### **3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja PD**

###### **3.2. Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja PD**

##### **BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

#### **2.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2021**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari perencanaan lima tahunan yakni Rencana Strategis PD. Sementara Perubahan Renja PD Tahun 2021 merupakan dokumen penghubung antara hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dengan pelaksanaan Renja PD Tahun 2021. Hasil penelaahan dan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 sampai dengan triwulan II diperoleh kebijakan untuk melakukan pergeseran kegiatan, penambahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan. Kebijakan didalam Perubahan Renja Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dilakukan untuk menjaga konsistensi akuntabilitas pencapaian kinerja tahunan terhadap kinerja lima tahunan

Pada penyusunan Renja PD Tahun 2021 terjadi perubahan aturan yang mendasari penyusunan Renja, sehingga di dalam proses penyusunan Renja PD Tahun 2021 dilakukan pemetaan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Terjadinya perubahan tersebut, pada tahapan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 juga mengikutsertakan hasil pemetaan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Keegiatannya yakni dengan menyandingkan Renja PD yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat di lihat pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1. EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS

URUSAN PEMERINTAHAN KONKRUEN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN																														
Kode Rek					Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 050-3078 Tahun 2020										Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dan Renstra s/d Tahun 2021							
U r u s	Bid U r u s	Pro g	Keg	S u b	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang di Evaluasi		I	II	III	IV	18	19=12+18		20=19/11 x 100%									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7					8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19=12+18		20=19/11 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2																														
2	16																													
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Huruf	B	25.510.444.000		33.350.589.000	B	7.685.497.228	15	1.217.127.815	15	2.125.021.594									3.342.149.409	430	36.692.738.409	4	1,44
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Angka	61	16.995.296.000	400	101.987.000	61	273.031.700	15	17.498.500	15	33.717.000								30	51.215.500	430	153.202.500	7	0,01
2	16	01	2.01	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	2	105.000.000	-	-	2	99.846.600	-	13.320.000	-	11.641.000								-	24.961.000	-	24.961.000	-	0,24
2	16	01	2.01	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	100.000.000	13	101.987.000	1	95.580.000	-	-	-	19.965.000								-	19.965.000	13	121.952.000	13	1,22
2	16	01	2.01	05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	60.000.000	-	-	1	54.139.300	-	-	-	-								-	-	-	-	0,00	
2	16	01	2.01	06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	dokumen	3	50.000.000	-	-	3	23.465.800	-	4.178.500	-	2.111.000								-	6.289.500	-	6.289.500	-	0,13
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti	persentase	100	5.587.000.000	400	1.135.000.000	100	5.183.433.724	25	937.921.613	25	1.302.548.041								50	2.240.469.654	55	2.305.469.654	3,00	3,03

2	16	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Persentase	100	5.200.000.000	-	-	100	5.152.001.724	25	937.921.613	25	1.302.548.041					50	2.240.469.654	50	2.240.469.654	1	0,43
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	dokumen	1	12.000.000	-	-	1	9.950.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	0,00
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang disusun	dokumen	2	25.000.000	5	65.000.000	2	21.482.000	-	-	-	-					-	-	5	65.000.000	3	2,60
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Orang	6	175.000.000	26	535.000.000	6	170.760.000	-	48.396.000	-	36.388.000	-	-	6	-	-	84.784.000	26	619.784.000	4,33	3,54
2	16	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan kantor	orang	6	175.000.000	26	535.000.000	6	170.760.000	-	48.396.000	-	36.388.000	-	-	-	-	-	84.784.000	26	619.784.000	4	3,54
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Orang	12	200.000.000	37	450.000.000	12	94.494.000	1	6.160.000	9	58.180.000	-	-	-	-	10	64.340.000	47	514.340.000	3,92	2,57
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	12	200.000.000	37	450.000.000	12	94.494.000	1	6.160.000	9	58.180.000	-	-	-	-	10	64.340.000	47	514.340.000	4	2,57
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase	100	802.102.000	400	4.386.310.000	100	771.582.300		84.517.700		157.601.637					921	242.119.337	2.921	4.628.429.337	####	33,59
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik yang tersedia	item	12	35.000.000	400	135.310.000	12	32.984.000	1	4.083.000	3	8.788.000					4	12.871.000	404	148.181.000	34	4,23
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	item	65	159.782.000	400	560.000.000	65	155.092.700	13	32.444.700	14	34.251.900					27	66.696.600	427	626.696.600	7	3,92
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kotak makanan dan minuman rapat dan kegiatan yang tersedia	kotak	2.120	90.320.000	400	291.000.000	2.120	68.900.000	499	16.240.000	342	11.140.000					841	27.380.000	1.241	318.380.000	1	3,53
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	item	7	17.000.000	400	255.000.000	7	16.439.600	2	3.800.000	1	2.390.000					3	6.190.000	403	261.190.000	58	15,36
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah yang dilakukan	kali	178	500.000.000	400	3.145.000.000	178	498.166.000	10	27.950.000	36	101.031.737					46	128.981.737	446	3.273.981.737	3	6,55
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	persentase	100	150.000.000	400	19.805.292.000	100	134.789.000		-		134.068.000					200	134.068.000	242	2.164.068.000	2	39

2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pengadaan mebel kantor	persentase	100	50.000.000	36	1.730.000.000	100	49.889.000	-	-	100	49.451.000					100	49.451.000	136	1.779.451.000	1	35,59
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor	persentase	100	100.000.000	6	300.000.000	100	84.900.000	-	-	100	84.617.000					100	84.617.000	106	384.617.000	1	3,85
		01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase	100	426.046.000	400	1.450.000.000	100	423.391.504		89.844.002		63.923.916					34	153.767.918	840	1.603.767.918	48,13	10,95
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga administrasi kantor yang tersedia	orang	10	195.000.000	400	565.000.000	10	194.992.200	3	51.600.000	2	30.800.000					4	82.400.000	404	647.400.000	40	3,32
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	persentase	100	190.000.000	400	765.000.000	100	189.999.304	15	28.644.002	14	26.723.916					29	55.367.918	429	820.367.918	4	4,32
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang tersedia	orang	2	41.046.000	6	120.000.000	2	38.400.000	1	9.600.000	0	6.400.000					1	16.000.000	7	136.000.000	3	3,31
		01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang laik pakai	Persentase	100	1.175.000.000	400	5.487.000.000	100	634.015.000	25	32.790.000	25	338.595.000					73	371.385.000	955	5.858.385.000	26,68	42,05
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan yang dipelihara dan diurus perizinannya	persentase	100	120.000.000	400	62.000.000	100	114.622.000	1	1.120.000	19	21.624.000					20	22.744.000	420	84.744.000	4	0,71
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan diurus perizinannya	persentase	100	80.000.000	9	1.825.000.000	100	70.548.000	4	2.870.000	7	5.091.000					11	7.961.000	20	1.832.961.000	0	22,91
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang laik pakai	persentase	100	75.000.000	400	890.000.000	100	62.620.000	-	-	36	22.380.000					36	22.380.000	436	912.380.000	4	12,17
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga kebersihan dan pramubhakti kantor	orang	6	275.000.000	21	650.000.000	6	115.200.000	2	28.800.000	1	19.200.000					3	48.000.000	24	698.000.000	4	2,54
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	item	4	625.000.000	52	2.060.000.000	4	271.025.000	-	-	4	270.300.000					4	270.300.000	56	2.330.300.000	14	3,73
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>													<b>25</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>12</b>					<b>50</b>	<b>43</b>	<b>93</b>	<b>62</b>	<b>24,55</b>	<b>16,90</b>	
<b>Predikat kinerja Program</b>													<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>					<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	



2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bobot Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE pada Domain Kebijakan Internal SPBE	persentase	100	500.000.000	100	6.250.000.000	100	460.000.000	25	114.000.000	41	190.000.000	-	-	66	304.000.000	166	6.554.000.000	2	13,11			
2	16	03	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rata-rata kecepatan transfer data internet	Mbps	100	500.000.000	650	6.250.000.000	100	460.000.000	24,78	114.000.000	41,30	190.000.000			66	304.000.000	716	6.554.000.000	7	13,11			
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bobot Domain Tata Kelola SPBE	persentase	5,6	1.825.220.000	5	3.910.000.000	5,6	1.802.073.000	1	270.725.861	2	452.419.300	-	-	3	723.145.161	8	4.633.145.161	1	2,54			
						Bobot Domain Layanan SPBE	persentase	11																				
2	16	03	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terkeolanya free hotspot area (Free Wi-Fi)	Titik	15	400.000.000	300	1.650.000.000	15	376.878.000	5,90	148.353.161	1,20	30.250.000			7	178.603.161	307	1.828.603.161	20	4,57			
2	16	03	2.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase menara telekomunikasi yang memenuhi standar operasi	persentase	60	290.220.000	100	200.000.000	100	290.220.000	27,78	80.621.000	11,84	34.350.000			40	114.971.000	140	314.971.000	2	1,09			
2	16	03	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bobot Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Domain Layanan SPBE	Aplikasi	11	135.000.000	2	300.000.000	2	135.000.000	0,47	31.500.000	0,31	21.000.000			1	52.500.000	3	352.500.000	0	2,61			
2	16	03	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Bobot Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Domain Layanan SPBE	persentase	4,4	800.000.000	9	1.500.000.000	32	799.989.000	0,41	10.251.700	14,67	366.819.300			15	377.071.000	24	1.877.071.000	5	2,35			
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Tenaga IT yang mengikuti Bimtek TIK	Orang	6	200.000.000	10	260.000.000	6	199.986.000	-	-	-	-			-	-	10	260.000.000	2	1,30			
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>														<b>25,00</b>	<b>17,01</b>	<b>0,41</b>	<b>28,40</b>						<b>66,00</b>	<b>45,41</b>	<b>83,00</b>	<b>89,60</b>	<b>1,50</b>	<b>7,82</b>
<b>Predikat kinerja Program</b>														<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>						<b>Sedang</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			225.000.000																				
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Satu Data Kabupten Bengkalis	persentase	80	225.000.000																			
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD dengan Statistik Sektoral terintegrasi pada Portal Data	persentase	80	225.000.000	300	1.000.000.000	80	205.800.000	20	16.400.000	20	49.540.000	-	-	32	65.940.000	132	1.065.940.000	1	5			

2	20	02	2.01	0	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase PD dengan statistik sektoral terintegrasi pada portal data	100%	100	225.000.000	100	1.000.000.000	100	205.800.000	7,97	16.400.000	24,07	49.540.000					32	65.940.000	132	1.065.940.000	1	4,74
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)															25,00	7,97	25,00	24,07					40,05	32,04	34,75	87,02	1,32	4,74
Predikat kinerja Program															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kabupaten Bengkalis			146.000.000		475.000.000		146.000.000		6.000.000		25.988.000	-	-			11	31.988.000	156	506.988.000	6	3
2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kabupaten Bengkalis		25	146.000.000	145	475.000.000	50	146.000.000	2	6.000.000	9	25.988.000	-	-			11	31.988.000	156	506.988.000	6	3
2	21	02	2.01			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	persentase	25	146.000.000	145	475.000.000	50	146.000.000	2,05	6.000.000	8,90	25.988.000	-	-			11	31.988.000	156	506.988.000	6	3
2	21	02	2.01	3		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Sistem Elektronik yang telah menggunakan Sertifikat Elektronik	persentase	25	146.000.000	145	475.000.000	50	146.000.000	2,05	6.000.000	8,90	25.988.000					11	31.988.000	156	506.988.000	6,23 819	3,47
									30.951.664.000				12.857.001.028		1.918.881.076		3.253.354.230						5.172.235.306					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)															4,11	4,11	17,80	17,80					21,91	21,91	124,8	81,64	6,24	3,47
Predikat kinerja Program															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)															20,78	9,40	18,60	19,73					45,51	48,50	85,18	82,24	7,62	8,19
Predikat Kinerja OPD															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Berdasarkan Tabel 2.1. di atas dapat diketahui bahwa Renja PD Tahun 2021 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan, dan 36 sub kegiatan dengan alokasi pagu anggaran indikatif sebesar Rp12.857.001.028,00 dengan rincian pagu anggaran adalah Belanja Operasi Sub Kegiatan Belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp5.152.001.724,00 dengan realisasi fisik sampai dengan paruh akhir triwulan kedua tahun 2021 yaitu periode Januari sampai dengan 30 Juni 2021 sebesar 48,49%, dan realisasi keuangan 43,49% atau sebesar Rp2.240.469.654,00. Pagu Belanja Operasi sebesar Rp7.704.999.304,00,- dengan realisasi fisik periode Januari sampai dengan 30 Juni 2021 sebesar 42,69% dan realisasi keuangan 36,57% atau sebesar Rp2.817.765.652,00, sehingga rata-rata realisasi fisik periode Januari sampai dengan 30 Juni 2021 sebesar 45,01% dan realisasi keuangan sebesar 39,34% atau setara dengan Rp5.058.235.306,00,-.

Kemudian, Tabel 2.1 di atas juga menunjukkan bahwa:

1. jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Renja PD Tahun 2021 adalah 5, 12 dan 36;
2. jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam DPA Tahun 2021 sebanyak 5, 12 dan 36;
3. jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Evaluasi Renja PD Triwulan II adalah 5, 12 dan 35; dan
4. jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja PD Tahun 2021 (Tabel 3.1.) dan 3.2.) adalah 5, 12 dan 35;.

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Renja PD Tahun 2021 sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam DPA Tahun 2021, namun dalam pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang di drop.

## **BAB III**

# **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

### **3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja PD**

Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2021 dilakukan atas dasar konsistensi terhadap tujuan, sasaran, indikator dan kinerja sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penetapan tujuan merupakan deskriptif yang mengarah kepada perumusan kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi PD. Sedangkan sasaran menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur.

Adapun tujuan dan sasaran Perubahan Renja PD Tahun 2021 adalah:

1. sebagai acuan untuk menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2021 yang tetap dilaksanakan pada tahun berjalan;
2. melakukan pergeseran sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan maupun penambahan sub kegiatan baru; dan
3. melakukan penambahan dan pengurangan pagu indikatif, penambahan dan pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi maupun kelompok sasaran kegiatan;

### **3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja PD**

Di dalam dokumen Renja PD Tahun 2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan 5 program, 12 kegiatan, dan 36 sub kegiatan. Sementara pada usulan Perubahan Renja PD Tahun 2021 terdapat 5 program, 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan (1 sub kegiatan di drop).

Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2021 merupakan Perubahan Renja tahun pertama yang disusun berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II di atas, proses penyusunan Renja PD Tahun 2021 dilakukan melalui pemetaan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pemetaan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada penyusunan Renja PD Tahun 2021 ini menghasilkan kecenderungan akan samanya antara Renja PD terhadap DPA PD Tahun 2021, sehingga pada Perubahan Renja PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021 pagu DPA PD Tahun 2021 ditetapkan menjadi dasar pagu sebelum perubahan. Untuk mengetahui Perubahan Renja berdasarkan pagu perubahan DPA Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Berdasarkan Tabel 3.1. dapat di lihat bahwa pagu Renja PD Tahun 2021 adalah sebesar Rp12.857.001.028,- dan pagu usulan Perubahan Renja PD Tahun 2021 sebesar Rp13.857.001.028 atau bertambah sebesar Rp1.000.000.000,-. Sedangkan pada Tabel 3.2. dapat di lihat bahwa pagu DPPA Pergeseran II adalah sebesar Rp12.366.216.257,- dan pagu usulan Perubahan Renja PD Tahun 2021 sebesar 13.858.060.733,- atau bertambah sebesar Rp1.491.844.476,-. Pagu DPPA Pergeseran II merupakan pagu Renja PD Tahun 2021 setelah dilakukan rasionalisasi dan *refocusing* anggaran untuk penanganan *Covid 19*.

Adapun rincian penambahan dan pengurangan belanja yang terdapat pada Perubahan Renja PD Tahun 2021 berdasarkan Tabel 3.2. adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu sebelum perubahan sebesar Rp4.949.402.953, pagu setelah perubahan sebesar Rp5.245.811.533,- atau bertambah sebesar Rp296.408.580,-
- b. Belanja Operasi Sub Kegiatan lainnya antara lain:
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu tetap Rp99.846.600,-
  2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD pagu tetap Rp95.580.000,-
  3. Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, pagu tetap Rp54.139.300,-
  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, pagu bertambah sebesar Rp2.500.000,- dari pagu sebelum perubahan Rp23.465.800,-
  5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, pagu tetap Rp9.950.000,-

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD, pagu tetap Rp21.482.000,-
7. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, pagu tetap Rp170.760.000,-
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, bertambah Rp75.000.000,- dari pagu sebelum perubahan Rp94.494.000,-
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, bertambah sebesar Rp10.000.000,- dari pagu sebelum perubahan Rp32.984.000,-
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, bertambah Rp10.000.000,- dari pagu sebelum perubahan Rp155.092.700,-
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, bertambah sebesar Rp5.100.000,- dari pagu sebelum perubahan Rp68.900.000,-
12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, pagu tetap Rp16.439.600,-
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, bertambah sebesar Rp205.245.000,- dari pagu sebelum perubahan Rp498.166.000,-
14. Pengadaan Mebel, pagu tetap Rp49.889.000,-
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, bertambah sebesar Rp250.000.000,- dari pagu sebelum perubahan Rp84.900.000,-
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, bertambah sebesar Rp6.000.000,- dari pagu sebelum perubahan Rp194.992.200,-
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, bertambah Rp6.500.696,- dari pagu sebelum perubahan Rp189.999.304,-
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, bertambah sebesar Rp1.800.000,- dari pagu sebelum perubahan Rp40.200.000,-
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pagu tetap Rp114.622.000,-
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pagu tetap Rp70.548.000,-
21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, bertambah sebesar Rp20.000.000,- dari pagu sebelum perubahan Rp62.620.000,-
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pagu tetap Rp115.200.000,-
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pagu tetap Rp271.025.000,-

24. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, bertambah sebesar Rp190.197.600,- dari pagu sebelum perubahan Rp659.802.400,-
25. Pengelolaan Media Komunikasi Publik, bertambah sebesar Rp32.161.600,- dari pagu sebelum perubahan Rp467.838.400,-
26. Pelayanan Informasi Publik, pagu tetap Rp350.000.000,-
27. Layanan Hubungan Media, bertambah sebesar Rp185.010.000,- dari pagu sebelum perubahan Rp664.990.000,-
28. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, pagu tetap Rp160.000.000,-
29. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, pagu tetap Rp165.000.000,-
30. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, pagu tetap Rp460.000.000,-
31. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik, bertambah sebesar Rp191.033.000,- dari pagu sebelum perubahan Rp135.000.000,-
32. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas., bertambah sebesar Rp4.888.000,- dari pagu sebelum perubahan Rp799.989.000,-
33. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, di drop pagu Rp0,-
34. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, pagu tetap Rp205.000.000,-
35. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, pagu tetap Rp146.000.000,-

3.1. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Murni) (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Selisish (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7)	10	11	12
2	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					12.857.001.028	13.857.001.028	1.000.000.000			6.230.000.000
2 16	Usuran Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.					12.505.201.028	13.505.201.028	1.000.000.000			6.030.000.000
2 16 01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)	Kab.Bengkalis	100%	100%	7.685.497.228	8.371.452.733	685.955.505		100%	6.030.000.000
2 16 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bengkalis	100%	100%	273.031.700	275.531.700	2.500.000		100%	310.000.000
2 16 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bengkalis	4 kali	4 kali	99.846.600	99.846.600	-		4 kali	110.000.000
2 16 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Asistensi Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Bengkalis	100%	100%	95.580.000	95.580.000	-		100%	110.000.000
2 16 01 2,01 05	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Bengkalis	2 kali	2 kali	54.139.300	54.139.300	-		2 kali	60.000.000
2 16 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab.Bengkalis	3 Dokumen	3 Dokumen	23.465.800	25.965.800	2.500.000		3 Dokumen	30.000.000

2	16	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Kemajuan Keuangan</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5.183.433.724</b>	<b>5.277.243.533</b>	<b>93.809.809</b>		<b>100%</b>	<b>5.245.000.000</b>
2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Anggaran gaji dan tunjangan ASN	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	5.152.001.724	5.245.811.533	93.809.809		1 Tahun	5.200.000.000
2	16	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kab.Bengkalis	100%	100%	9.950.000	9.950.000	-		100%	15.000.000
2	16	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran.	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	21.482.000	21.482.000	-		1 Tahun	30.000.000
2	16	01	2,03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Tenaga Keamanan Kantor</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>6 Orang</b>	<b>6 Orang</b>	<b>170.760.000</b>	<b>170.760.000</b>	<b>-</b>		<b>6 Orang</b>	<b>175.000.000</b>
2	16	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Jasa tenaga keamanan Kantor	Kab.Bengkalis	6 Orang	6 Orang	170.760.000	170.760.000	-		6 Orang	175.000.000
2	16	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>12 Orang</b>	<b>12 Orang</b>	<b>94.494.000</b>	<b>169.494.000</b>	<b>75.000.000</b>		<b>12 Orang</b>	<b>300.000.000</b>
2	16	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ASN/Non ASN	Kab.Bengkalis	12 Orang	12 Orang	94.494.000	169.494.000	75.000.000		12 Orang	300.000.000
2	16	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>771.582.300</b>	<b>1.001.927.300</b>	<b>230.345.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.315.000.000</b>
2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor.	Kab.Bengkalis	100%	100%	32.984.000	42.984.000	10.000.000		100%	45.000.000
2	16	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Bengkalis	100%	100%	155.092.700	165.092.700	10.000.000		100%	175.000.000
2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kab.Bengkalis	100%	100%	68.900.000	74.000.000	5.100.000		100%	75.000.000

2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Kab.Bengkalis	100%	100%	16.439.600	16.439.600	-	100%	20.000.000
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi ke luar dan dalam daerah.	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	498.166.000	703.411.000	205.245.000	1 Tahun	1.000.000.000
2	16	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana kantor</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>134.789.000</b>	<b>384.789.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>250.000.000</b>
2	16	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Bertambahnya Mebel Kantor	Kab.Bengkalis	80%	80%	49.889.000	49.889.000	-	80%	-
2	16	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	Bertambahnya sarana dan prasarana kantor	Kab.Bengkalis	80%	80%	84.900.000	334.900.000	250.000.000	80%	250.000.000
2	16	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>423.391.504</b>	<b>437.692.200</b>	<b>14.300.696</b>	<b>100%</b>	<b>455.000.000</b>
2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa tenaga administrasi kantor	Kab.Bengkalis	100%	100%	194.992.200	200.992.200	6.000.000	100%	200.000.000
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.	Kab.Bengkalis	100%	100%	189.999.304	196.500.000	6.500.696	100%	200.000.000
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Sopir Kantor	Kab.Bengkalis	2 Orang	2 Orang	38.400.000	40.200.000	1.800.000	2 Orang	55.000.000
2	16	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>634.015.000</b>	<b>654.015.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>365.000.000</b>
2	16	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan diurus perizinannya.	Kab.Bengkalis	4 Unit	4 Unit	114.622.000	114.622.000	-	4 Unit	125.000.000
2	16	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan diurus perizinannya.	Kab.Bengkalis	1 Unit	1 Unit	70.548.000	70.548.000	-	1 Unit	85.000.000

2	16	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	62.620.000	82.620.000	20.000.000		1 Tahun	80.000.000
2	16	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa tenaga kebersihan kantor	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	115.200.000	115.200.000	-		1 Tahun	50.000.000
2	16	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	271.025.000	271.025.000	-		1 Tahun	25.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>			<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase jejaring informasi dan media massa yang tersedia.</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>2.557.630.800</b>	<b>2.879.650.295</b>	<b>322.019.495</b>		<b>90%</b>	<b>4.100.000.000</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>	<b>2,01</b>		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bengkalis.</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.557.630.800</b>	<b>2.879.650.295</b>	<b>322.019.495</b>		<b>100%</b>	<b>4.100.000.000</b>
2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pembangunan daerah.	Kab.Bengkalis	34 kali	34 Kali	749.802.400	850.000.000	100.197.600		34 kali	850.000.000
2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terkelolanya Media Center	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	467.838.400	504.650.295	36.811.895		1 Tahun	500.000.000
2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah tenaga Operator PPID Utama dan SP4N LAPOR	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	350.000.000	350.000.000	-		1 Tahun	350.000.000
2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya kerjasama kemitraan Media	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	664.990.000	850.000.000	185.010.000		1 Tahun	2.000.000.000
2	16	02	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya sosialisasi keterbukaan informasi Publik.	Kab.Bengkalis	2 Kecamatan	2 Kecamatan	160.000.000	160.000.000	-		2 Kecamatan	200.000.000
2	16	02	2,01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya koordinasi pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	Kab.Bengkalis	44 Kali	44 Kali	165.000.000	165.000.000	-		44 Kali	200.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>			<b>Progam Aplikasi Informatika</b>	<b>Persentase Percepatan transfer data Internet</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.262.073.000</b>	<b>2.254.098.000</b>	<b>- 7.975.000</b>		<b>100%</b>	<b>3.467.098.000</b>

2	16	03	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Percepatan transfer data Internet	Kab.Bengkalis	100%	100%	460.000.000	460.000.000	-		100%	1.500.000.000
2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Internet	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	460.000.000	460.000.000	-		1 Tahun	1.500.000.000
2	16	03	2,02		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis		100%	100%	1.802.073.000	1.794.098.000	- 7.975.000		100%	1.967.098.000
2	16	03	2,02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Tenga Networking Intermediate dan Operator Web.	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	376.878.000	376.878.000	-		1 Tahun	376.878.000
2	16	03	2,02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi.	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	290.220.000	290.220.000	-		1 Tahun	290.220.000
2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah tenaga Programmer Intermediate	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	135.000.000	325.000.000	190.000.000		1 Tahun	300.000.000
2	16	03	2,02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	799.989.000	802.000.000	2.011.000		1 Tahun	800.000.000
2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.	Terlaksananya Bimbingan teknis TIK	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	199.986.000	-	- 199.986.000		1 Tahun	200.000.000

2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				205.800.000	205.800.000	-			250.000.000			
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik daerah.	Kab.Bengkalis	75%	75%	205.800.000	205.800.000	-		75%	250.000.000		
2	20	02	2,01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah dengan statistik sektoral terintegrasi pada portal data.	Kab.Bengkalis	100%	100%	205.800.000	205.800.000	-		100%	250.000.000	
2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan statistik sektoral.	Kab.Bengkalis	46 PD	46 PD	205.800.000	205.800.000	-		46 PD	250.000.000
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				146.000.000	146.000.000	-				200.000.000		
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan dan Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.	Kab.Bengkalis	45%	45%	146.000.000	146.000.000	-		45%	200.000.000		
2	21	02	2,01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase perangkat daerah yang memiliki sertifikat elektronik.	Kab.Bengkalis	50%	50%	146.000.000	146.000.000	-		50%	200.000.000	
2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya koordinasi untuk fasilitasi pengamanan informasi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian.	Kab.Bengkalis	16 Kali	16 Kali	146.000.000	146.000.000	-		16 Kali	200.000.000

Bengkalis, 28 Juni 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BENGKALIS

DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN  
STATISTIK

**Drs. JOHANSYAH SYAFRI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680411 199303 1 009

Kemudian, di sisi lain, pandemi global *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sangat mempengaruhi perekonomian nasional hampir di seluruh sektor baik makro maupun mikro yang pada tahapan selanjutnya mempengaruhi proyeksi pendapatan nasional. Sehingga pelaksanaan APBD Tahun 2021 sampai dengan triwulan II Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan 2 (dua) kali pergeseran anggaran dan pada pergeseran anggaran kedua dilakukan pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD yaitu dilakukannya rasionalisasi dan *refocusing* anggaran yang diprioritaskan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, penanganan pandemi *covid-19*, memenuhi standar pelayanan minimal, *mandatory spending* serta program prioritas lainnya.

Pergeseran anggaran II yang mempengaruhi Perubahan APBD ini juga menjadi pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam Perubahan APBD Tahun 2021 sehingga pergeseran II juga ditetapkan menjadi dasar pagu sebelum perubahan. Untuk mengetahui Perubahan Renja berdasarkan pagu Pergeseran II DPPA Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

3.2. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 202

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Geser II) (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Selisish (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7)	10	11	12
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					12.366.216.257	13.858.060.733	1.491.844.476			16.432.098.000
2 16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.					12.014.416.257	13.506.260.733	1.491.844.476			15.982.098.000
2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)	Kab.Bengkalis	100%	100%	7.484.698.457	8.373.252.733	888.554.276		100%	8.415.000.000
2 16 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bengkalis	100%	100%	273.031.700	275.531.700	2.500.000		100%	310.000.000
2 16 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bengkalis	4 kali	4 kali	99.846.600	99.846.600	-		4 kali	110.000.000
2 16 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Asistensi Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Bengkalis	100%	100%	95.580.000	95.580.000	-		100%	110.000.000
2 16 01 2,01 05	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Bengkalis	2 kali	2 kali	54.139.300	54.139.300	-		2 kali	60.000.000
2 16 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab.Bengkalis	3 Dokumen	3 Dokumen	23.465.800	25.965.800	2.500.000		3 Dokumen	30.000.000

<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2,02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Kemajuan Keuangan</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.980.834.953</b>	<b>5.277.243.533</b>	<b>296.408.580</b>	<b>100%</b>	<b>5.245.000.000</b>	
2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Anggaran gaji dan tunjangan ASN	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	4.949.402.953	5.245.811.533	296.408.580	1 Tahun	5.200.000.000
2	16	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kab.Bengkalis	100%	100%	9.950.000	9.950.000	-	100%	15.000.000
2	16	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran.	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	21.482.000	21.482.000	-	1 Tahun	30.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2,03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Tenaga Keamanan Kantor</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>6 Orang</b>	<b>6 Orang</b>	<b>170.760.000</b>	<b>170.760.000</b>	<b>-</b>	<b>6 Orang</b>	<b>175.000.000</b>	
2	16	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Jasa tenaga keamanan Kantor	Kab.Bengkalis	6 Orang	6 Orang	170.760.000	170.760.000	-	6 Orang	175.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>12 Orang</b>	<b>12 Orang</b>	<b>94.494.000</b>	<b>169.494.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>12 Orang</b>	<b>300.000.000</b>	
2	16	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ASN/Non ASN	Kab.Bengkalis	12 Orang	12 Orang	94.494.000	169.494.000	75.000.000	12 Orang	300.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>771.582.300</b>	<b>1.001.927.300</b>	<b>230.345.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.315.000.000</b>	
2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor.	Kab.Bengkalis	100%	100%	32.984.000	42.984.000	10.000.000	100%	45.000.000
2	16	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Bengkalis	100%	100%	155.092.700	165.092.700	10.000.000	100%	175.000.000
2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kab.Bengkalis	100%	100%	68.900.000	74.000.000	5.100.000	100%	75.000.000

2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor	Kab.Bengkalis	100%	100%	16.439.600	16.439.600	-	100%	20.000.000
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi ke luar dan dalam daerah.	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	498.166.000	703.411.000	205.245.000	1 Tahun	1.000.000.000
2	16	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana kantor</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>134.789.000</b>	<b>384.789.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>250.000.000</b>
2	16	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Bertambahnya Mebel Kantor	Kab.Bengkalis	80%	80%	49.889.000	49.889.000	-	80%	-
2	16	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	Bertambahnya sarana dan prasarana kantor	Kab.Bengkalis	80%	80%	84.900.000	334.900.000	250.000.000	80%	250.000.000
2	16	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>425.191.504</b>	<b>439.492.200</b>	<b>14.300.696</b>	<b>100%</b>	<b>455.000.000</b>
2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa tenaga administrasi kantor	Kab.Bengkalis	100%	100%	194.992.200	200.992.200	6.000.000	100%	200.000.000
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.	Kab.Bengkalis	100%	100%	189.999.304	196.500.000	6.500.696	100%	200.000.000
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Sopir Kantor	Kab.Bengkalis	2 Orang	2 Orang	40.200.000	42.000.000	1.800.000	2 Orang	55.000.000
2	16	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>634.015.000</b>	<b>654.015.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>365.000.000</b>
2	16	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan diurus perizinannya.	Kab.Bengkalis	4 Unit	4 Unit	114.622.000	114.622.000	-	4 Unit	125.000.000

2	16	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan diurus perizinannya.	Kab.Bengkalis	1 Unit	1 Unit	70.548.000	70.548.000	-		1 Unit	85.000.000
2	16	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	62.620.000	82.620.000	20.000.000		1 Tahun	80.000.000
2	16	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa tenaga kebersihan kantor	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	115.200.000	115.200.000	-		1 Tahun	50.000.000
2	16	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	271.025.000	271.025.000	-		1 Tahun	25.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>			<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase jejaring informasi dan media massa yang tersedia.</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>2.467.630.800</b>	<b>2.875.000.000</b>	<b>407.369.200</b>		<b>90%</b>	<b>4.100.000.000</b>
2	16	02	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bengkalis.	Kab.Bengkalis	100%	100%	2.467.630.800	2.875.000.000	407.369.200		100%	4.100.000.000
2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pembangunan daerah.	Kab.Bengkalis	34 kali	34 Kali	659.802.400	850.000.000	190.197.600		34 kali	850.000.000
2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terkelolanya Media Center	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	467.838.400	500.000.000	32.161.600		1 Tahun	500.000.000
2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah tenaga Operator PPID Utama dan SP4N LAPOR	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	350.000.000	350.000.000	-		1 Tahun	350.000.000
2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya kerjasama kemitraan Media	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	664.990.000	850.000.000	185.010.000		1 Tahun	2.000.000.000
2	16	02	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya sosialisasi keterbukaan informasi Publik.	Kab.Bengkalis	2 Kecamatan	2 Kecamatan	160.000.000	160.000.000	-		2 Kecamatan	200.000.000

2	16	02	2,01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya koordinasi pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	Kab.Bengkalis	44 Kali	44 Kali	165.000.000	165.000.000	-		44 Kali	200.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>			<b>Progam Aplikasi Informatika</b>	<b>Persentase Percepatan transfer data Internet</b>	<b>Kab.Bengkalis</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.062.087.000</b>	<b>2.258.008.000</b>	<b>195.921.000</b>		<b>100%</b>	<b>3.467.098.000</b>
2	16	03	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Percepatan transfer data Internet	Kab.Bengkalis	100%	100%	460.000.000	460.000.000	-		100%	1.500.000.000
2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Internet	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	460.000.000	460.000.000	-		1 Tahun	1.500.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>2,02</b>		<b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.</b>	<b>Persentase Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.602.087.000</b>	<b>1.798.008.000</b>	<b>195.921.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.967.098.000</b>
2	16	03	2,02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Tenga Networking Intermediate dan Operator Web.	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	376.878.000	376.878.000	-		1 Tahun	376.878.000
2	16	03	2,02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi.	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	290.220.000	290.220.000	-		1 Tahun	290.220.000
2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah tenaga Programmer Intermediate	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	135.000.000	326.033.000	191.033.000		1 Tahun	300.000.000
2	16	03	2,02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	799.989.000	804.877.000	4.888.000		1 Tahun	800.000.000
2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.	Terlaksananya Bimbingan teknis TIK	Kab.Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-		1 Tahun	200.000.000

2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				205.800.000	205.800.000	-			250.000.000		
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik daerah.	Kab.Bengkalis	75%	75%	205.800.000	205.800.000	-		75%	250.000.000	
2	20	02	2,01	Penyelenggaraan Statsitik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah dengan statistik sektoral terintegrasi pada portal data.	Kab.Bengkalis	100%	100%	205.800.000	205.800.000	-		100%	250.000.000
2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan statistik sektoral.	Kab.Bengkalis	46 PD	46 PD	205.800.000	205.800.000	-	46 PD	250.000.000
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					146.000.000	146.000.000	-			200.000.000	
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan dan Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.	Kab.Bengkalis	45%	45%	146.000.000	146.000.000	-		45%	200.000.000	
2	21	02	2,01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota.	Persentase perangkat daerah yang memiliki sertifikat elektronik.	Kab.Bengkalis	50%	50%	146.000.000	146.000.000	-		50%	200.000.000
2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya koordinasi untuk fasilitasi pengamanan informasi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian.	Kab.Bengkalis	16 Kali	16 Kali	146.000.000	146.000.000	-	16 Kali	200.000.000

Bengkalis, 28 Juni 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BENGKALIS

DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN  
STATISTIK

**Drs. JOHANSYAH SYAFRI**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680411 199303 1 009

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Penutup**

Perubahan Renja PD Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis merupakan Perubahan Renja tahun pertama yang disusun berdasarkan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020. Perubahan Renja PD Tahun 2021 adalah dokumen penghubung antara hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dengan pelaksanaan Renja PD Tahun 2021. Perubahan Renja PD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Renja PD dan Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis. Hasil penelaahan dan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 akan diperoleh kebijakan untuk melakukan pergeseran kegiatan, penambahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja PD Tahun 2021 ini menjadi sangat penting artinya karena menjadi acuan Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021. Kebijakan di dalam Perubahan Renja PD Tahun 2021 dilakukan dengan tetap menjaga konsistensi akuntabilitas pencapaian kinerja tahunan terhadap kinerja lima tahunan yang berpedoman pada Renstra PD, RPJMD dan RPJPD Kabupaten Bengkalis.

Semoga Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Bengkalis, 28 Juni 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BENGKALIS**  
**Drs. JOHANSYAH SYAFRI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680411 199303 1 009